

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

OKI merupakan organisasi internasional yang didirikan di Rabat, Maroko pada 25 September 1969 yang ditunjukan untuk mengumpulkan seluruh sumber daya anggotanya, serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan dari seluruh masyarakat negara anggota dan seluruh umat islam di dunia. Organisasi ini sebagai institusi yang didasarkan pada norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah antar negara yang mencakup berbagai bidang dalam hubungan internasional khususnya di negara-negara islam. Namun dalam hal ini OKI tidak memiliki otoritas yuridiksi terhadap penentu pengambilan keputusan. Seperti dalam piagam OKI tercatat bahwa OKI secara ketat berpegang pada prinsip-prinsip non-intervensi dalam hal-hal yang sesungguhnya merupakan hak yuridiksi nasional negara anggota.

Setelah berakhirnya perang dingin pada akhir tahun 1990-an yang ditandai dengan kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet, Amerika menjadi negara super power yang paling berpengaruh di dunia. Dengan kekuatan yang dia miliki, Amerika mencoba menawarkan konsep baru kepada dunia internasional yaitu konsep "negara demokrasi". Banyak negara dunia ketiga yang baru memperoleh kemerdekaan dengan dorongan situasi politik internasioanal saat itu menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi.

Lain halnya dengan negara-negara islam yang masih menganut sistem monarki. Kecenderungan sistem monarki yang tertutup dimana raja berkuasa

dengan sangat eksklusif menjadikan negara islam menghendaki sistem pemerintahan yang terbuka seperti halnya demokrasi.

Pada tahun 2010 terdapat fenomena Arab Spring yaitu situasi dimana terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran di negara-negara islam yang menuntut diterapkan sistem demokrasi untuk menggantikan pemerintahan monarki. Gelombang ini bisa disebut juga sebagai sekumpulan transisi dari rezim penguasa yang bersifat non-demokrasi (biasanya bersifat otoriter) menuju rezim demokratis, yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak dari pada transisi menuju arah sebaliknya. Menurut Huntington sebagian gelombang tersebut mencakup demokratisasi atau liberalisasi, sebagian besar terjadi pada sistem politik yang tidak sepenuhnya demokratis.¹

Hal serupa terjadi di negara Suriah pada Maret 2011. Masyarakat Suriah menginginkan digulingkan presiden Bashar Al-Assad yang mereka rasa otoriter. Kemudian sistem pemerintahan yang ada digantikan dengan sistem yang dikehendaki. Berbagai konflik telah terjadi di Suriah sejak awal munculnya Arab Spring di Suriah.

Konflik ini telah menimbulkan begitu banyak kerugian materil dan imateril. Hal ini tentu saja berdampak pada terganggunya perekonomian dan keamanan negara Suriah. Berdasarkan survey Global Peace Index (GPI) di tahun

¹ Samuel P Huntington dalam Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah* (Yogyakarta : 2014), h. 204

2012 akibat konflik internal di Suriah, negara ini masuk kedalam urutan ke 147 dari 158 negara dengan tingkat keamanan yang sangat rendah.²

Konflik di Suriah terjadi antara pemerintah Bashar dan masyarakat Suriah. Mayoritas masyarakat Suriah tergabung dalam kelompok oposisi pemerintahan, selain itu kelompok pemberontak seperti FSA (*Free Syrian Army*) yang berbasis sekuler dan kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kelompok jihadis seperti Front Al-Nusra, dan ISIS (*Islamic State of Irak and Syam*).

Kelompok jihadis tersebut merupakan anak kandung dari kelompok islam radikal Al-Qaeda yang berbasis di Afganistan. Kelompok-kelompok pemberontak ini selain melakukan perlawanan terhadap kubu pemerintah, diantara mereka pun terjadi pertikaian, alasan utamanya adalah karena perbedaan cita-cita sistem pemerintahan, kelompok oposisi nasional menginginkan sistem pemerintahan yang demokratis namun kelompok jihadis menginginkan berdirinya khilafah islamiyah di Suriah.

Munculnya fenomena kelompok pemberontak yang berafiliasi dengan kelompok jihadis internasional seperti Al-Qaeda merupakan suatu indikator bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan masalah internasional. Oleh sebab itu diperlukan sebuah organisasi internasional untuk menengahi proses penyelesaian konflik.

Dalam merespon konflik di Suriah, OKI sebagai sebuah institusi yang berperan mengelola konflik negara anggota, termasuk negara Suriah berupaya

² Global Peace Index (GPI) diakses 20 Mei 2014

melakukan beberapa penyelesaian konflik. Model penyelesaian yang ditempuh OKI adalah melalui jalur konsiliasi. Konsiliasi ini berupa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 12 di Kairo Mesir pada 6-7 Februari 2013 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ke-4 yang dilaksanakan di Makkah pada 14 Agustus 2012 yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota. Konferensi ini OKI menghasilkan poin-poin komunikasi sebagai resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara Islam termasuk Suriah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan :

Bagaimana resolusi konflik yang dihasilkan OKI sebagai upaya penyelesaian konflik di Suriah ?

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dibutuhkan ketelitian dalam menganalisis. Untuk menjawab dan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di atas maka diperlukan landasan teori serta didukung dengan berbagai varian ilmu pengetahuan. Untuk menjelaskan mengenai resolusi konflik yang dihasilkan OKI dalam KTT ke 12 di Kairo Mesir dalam upaya penyelesaian konflik Suriah, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu teori rezim dan metode-metode penyelesaian konflik.

Pada pendekatan fungsional ini, rezim berfungsi sebagai fasilitator proses tawar menawar (*bargaining*) dalam hubungan internasional, serta berperan sebagai perantara negoisasi antar aktor dalam rezim. Dengan dilaksanakannya negoisasi diharapkan tercapai keputusan akhir yang hasilnya menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah sebuah rezim yang dibentuk untuk menaungi kepentingan bersama (*common interest*) anggotanya. Sehingga dengan adanya kerjasama memungkinkan tercapainya kepentingan dengan cepat dan lebih mudah. Berdirinya OKI memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan mengadakan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial, budaya dan iptek.

Sebagai rezim internasional yang berbasis pendekatan fungsional, OKI digunakan sebagai alat oleh para aktor rezim untuk mencapai kepentingan yang mereka miliki. Begitu pula dalam konflik Suriah, OKI selaku rezim internasional memiliki wewenang sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menengahi konflik (*fasilitator*) dan mencari pemecahan masalahnya karena konflik yang terjadi sudah begitu kompleks maka dibutuhkan intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

Namun OKI sebagai rezim memiliki suatu permasalahan dalam hal otoritas yuridiksi (*penentu keputusan*) karena OKI hanya berperan sebagai fasilitator penengah konflik yang terjadi antara masyarakat Suriah dan presiden Bashar Al-Assad melalui metode perundingan. Metode perundingan merupakan metode intervensi konflik dengan cara pendekatan anti kekerasan, karena

kekerasan mungkin tidak akan mencapai apapun, malah kemungkinan besar akibatnya hanya berupa penderitaan.⁴

2. Model-Model Penyelesaian Konflik Internasional

Dalam mencari solusi pemecahan terhadap sebuah konflik pendekatan anti kekerasan merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik karena bersifat sangat positif, kreatif, imajinatif dan menyembuhkan.

Berikut ini merupakan beberapa metode penyelesaian konflik dengan pendekatan anti kekerasan menurut Wirawan.⁶

a) Mediasi

Mediasi menurut Christopher W. Moore adalah

*“ Generally defined as the intervention in a negotiation or conflict acceptable third party who has limited or no authoritative decision making who assist the involved parties to voluntarily reach mutually acceptable settlement of the issues in dispute ”*⁷

Mediasi terjadi karena kedua pihak yang bertikai tidak menyelesaikan konflik secara mandiri. Mediasi biasanya bersifat nonfleksibel karena pihak yang bertikai bisa mendisain sendiri prosedur mediasi.

Dalam proses mediasi diperlukan upaya dari pihak yang bertikai dan mediator. Selama proses mediasi terjadi kedua belah pihak melakukan pendekatan dan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan.

⁴ Simon Fisher dkk, *Mengelola konflik* (Jakarta : The British Council Indonesia, 2013)

⁵ Ibid, 97

⁶ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta : Salemba Humanika, 2013)

⁷ ibid

penyelesaian konflik. Dalam mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang membimbing para pihak untuk melakukan negoisasi sampai terdapat kesepakatan yang disetujui dan diinginkan kedua pihak. Kesepakatan ini kemudian menjadi sebuah perjanjian. Dalam proses mediasi tidak terdapat pihak yang menang atau kalah karena hasil kesepakatan dibuat berdasarkan kemauan kedua pihak yang bertikai.

a) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik dengan intervensi pihak ketiga dengan menggunakan media perundingan yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang bersifat netral. Pihak ketiga yang menengahi konflik bisa berupa negara atau komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi bisa juga terlembaga, dimana mereka membuat persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, keputusan yang dibuat oleh komisi ini biasanya bersifat tidak mengikat berbeda dengan hasil dari proses mediasi.

Dibanding dengan mediasi konsiliasi memiliki hukum acara yang bersifat formal. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan

penyelesaian sengketa. Jika para pihak setuju, solusi yang dibuat konsiliator disebut *resolution*.⁸

b) Arbitrase

Menurut Christopher A Moore arbitrase adalah proses penyelesaian konflik dimana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan mengenai penyelesaian konflik.⁹ Berbeda dengan mediasi, arbitrase lebih memiliki kekuatan hukum. Pada konflik internasional proses penyelesaian sengketa akan melalui jalur arbitrase akan dibawa pada Mahkamah Internasional PBB.

Pada saat proses penyelesaian konflik arbiter akan melakukan dialog dengan masing-masing pihak untuk mendengar pendapat mereka. Masing-masing pihak mengemukakan pendapat mereka dengan disertai bukti yang mendukung.

Arbiter akan secara aktif menggali informasi mengenai konflik dan membuat peta sebab konflik yang kemudian digunakan untuk membuat alternatif kemungkinan resolusi konflik yang akan dibahas dengan pihak yang bertikai. Keputusan yang dibuat oleh arbiter bersifat mengikat karena memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu apabila satu pihak tidak menaati hasil kesepakatan resolusi, maka pihak tersebut berhak mendapatkan sanksi dari pengadilan.

⁸ Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif persengketaan Perdata di Pengadilan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)h. 34

⁹ Op.cit 214

OKI yang berperan sebagai pihak ketiga (*intervener*) cukup banyak melakukan upaya penciptaan perdamaian dengan cara konsiliasi. Begitupun dalam proses penyelesaian konflik Suriah. Dalam konflik Suriah model konsiliasi yang dilakukan OKI adalah dengan cara menunjuk negara Mesir untuk bekerjasama dengan OKI. Kerjasama ini ditunjukkan dengan keterlibatan Mesir sebagai tuan rumah KTT OKI ke-12.

Mesir merupakan salah satu negara anggota OKI yang mendukung terwujudnya perdamaian Suriah. Selain itu Mesir dianggap sebagai negara arab dengan posisi netral dalam konflik Suriah. Selain netral, Mesir dianggap tidak memiliki kepentingan dalam proses intervensinya. Berbeda dengan negara-negara arab lainnya yang mengintervensi karena memiliki kepentingan seperti Iran, dan Arab Saudi. Alasan historis juga menjadi alasan mengapa OKI menunjuk Mesir. Mesir dianggap sebagai negara yang telah dewasa di kawasan arab terutama dalam keterlibatan konflik di kawasan arab. Oleh karena itu, mesir dianggap sebagai negara yang telah dewasa yang mungkin dapat bertindak bijaksana sebagai penengah konflik.

Proses-proses penyelesaian konflik yang dilakukan OKI dengan cara konsiliasi yaitu dengan mengadakan pertemuan anggota OKI dilakukan sebagai upaya menghindari jalur kekerasan atau perang. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip OKI yang tertera dalam Piagam OKI bab 1 pasal 3 dimana dalam proses penyelesaian perselisihan menggunakan cara-cara damai dan menahan diri dengan penggunaan cara-cara kekerasan.

D. Hipotesa

Dari permasalahan yang telah dipaparkan serta kerangka dasar teori yang telah digunakan diatas, maka dapat diambil hipotesa bahwa resolusi konflik yang dihasilkan OKI sebagai upaya penyelesain konflik di Suriah melalui jalur konsiliasi adalah :

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI ke-12 di Kairo Mesir pada 7 Februari 2013 yang menghasilkan 13 poin komunike
2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI ke-4 di Makkah Saudi Arabia pada 14 Agustus 2012 yang menghasilkan 6 poin komunie.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya OKI sebagai sebuah organisasi internasional dalam proses penyelesain konflik negara anggota, khususnya Suriah. Dalam konflik Suriah OKI berupaya menemukan solusi atas persengketaan yang terjadi antara masyarakat Suriah dengan pemerintahan presiden Bashar Al-Assad dengan dengan cara konsiliasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui resolusi OKI pada KTT ke-12 yang berupa 13 komunike, dimana komunike tersebut dirasa belum sepenuhnya bisa menyelesaikan konflik.

Yang tidak kalah penting juga penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari proses perkuliahan dengan mengeksplanasi teori dengan fenomena realitas yang ada dengan harapan dikemudian hari dapat bermanfaat untuk mahasiswa Hubungan Internasional khususnya dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum. Adapun tujuan yang penulis

harapkan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk syarat dalam memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan OKI pada KTT ke 12 di Kairo Mesir yang bertujuan menyelesaikan konflik Suriah paska terjadinya Arab Spring. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI menghasilkan 13 poin komunikasi sebagai solusi atas konflik yang terjadi di Suriah. Sebagai sebuah rezim yang berbasis pendekatan fungsional yang menganggap bahwa rezim dapat menjadi fasilitator terjadinya negosiasi untuk mencapai tujuan bersama dalam hal ini adalah perdamaian di Suriah, OKI melakukan proses perdamaian dengan cara konsiliasi salah satunya adalah KTT ke-12 yang dilaksanakan di Kairo Mesir. Dalam menganalisis konflik Suriah penulis membatasi jangkauan penelitian yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Dimana awal kemunculan konflik akibat fenomena Arab Spring sampai sekarang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti pada suatu waktu tertentu.¹⁰

¹⁰ J. Suprpto, dalam Skripsi Dwi Apriyanto *Signifikansi Pengentasan Kemiskinan Sebagai Upaya Perdamaian*, UMY, 2008, hal 24

2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder. Dimana pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel. Ditambah menggunakan data yang diunduh dari situs-situs online dari internet seperti media-media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian yang penulis teliti.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti saran Miles dan Huberman dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga tahap : mereduksi data ,menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan hingga data yang terkumpul saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.¹¹

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti : melalui seleksi ketat, melalui

¹¹ Mattew B. Miles dan A. Micheal Huberman dalam Skripsi Dwi Apriyanto *Signifikasi Pengentasan Kemiskinan Sebagai Upaya Perdamaian* , UMY, 2008, hal 24

ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

b) Sajian data (data display)

Sajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data meliputi berbagai jenis table, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c) Menarik kesimpulan/verifikasi (concluding drawing)

Menarik kesimpulan dilakukan setelah reduksi data dan sajian data disusun. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir atau dirasa cukup oleh peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk diuji validitasnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi, penulis membaginya kedalam lima bab dimana masing-masing bab akan dilakukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut yang terjabarkan secara rinci kedalam sub bab-sub bab yang antara satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan sehingga pada akhirnya akan diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis.

BAB 1 berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB 11 berisi tentang dinamika peran OKI dalam penyelesaian konflik di dunia islam. Kemudian akan dijelaskan tentang latarbelakang, visi misi, badan-badan OKI, selanjutnya akan dibahas mengenai peran OKI dalam menangani konflik dinegara-negara islam.

BAB 111 berisi tentang dinamika konflik yang terjadi di Suriah. Awalnya akan dijelaskan tentang profil negara Suriah, latar belakang munculnya konflik serta dinamika konflik yang terjadi sejak awal kemunculan Arab Spring sampai saat ini.

BAB 1V berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan OKI dalam menyelesaikan konflik Suriah.

BAB V berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman-rangkuman dari penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dari BAB 11 hingga BAB 1V, sekaligus merupakan penutup dalam skripsi ini.